



Dana Pilkada Membengkak

★ Dewan Sebut Sulit Dirasionalisasi

Estimasi kebutuhan dana Pilkada Buleleng 2017 mendatang, capai Rp 70 miliar lebih. Naik hampir tiga kali lipat dari Pilkada sebelumnya yang habiskan sekitar Rp 25 miliar



KETUA KPU Buleleng Gede Suardana (tengah) sedang berjuang usulan anggaran Pilkada tahun 2017.

SINGARAJA, NusaBali

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Buleleng tahun 2017 mendatang, mulai menguras pikiran dan energi para pemangku kepentingan. Masalahnya dana tersebut harus dirancang di dalam APBD Induk tahun 2016, dengan jumlah yang cukup fantastis, mencapai tiga kali lipat dari kebutuhan dana Pilkada tahun 2012 lalu.

Kebutuhan dana dalam pelak-

sanaan Pilkada Buleleng tahun 2017 nanti, diperkirakan mencapai Rp 70 miliar lebih. Kebutuhan dana itu jauh lebih besar dibanding Pilkada tahun 2012, hanya sebesar Rp 25 miliar lebih. Dalam Pilkada Buleleng tahun 2017 nanti, KPU Buleleng memperkirakan kebutuhan dana sebesar Rp 46,8 miliar, kemudian Bawaslu Kabupaten sebesar Rp 10 miliar, dan kepolisian sebesar Rp 9 miliar. Kebutuhan

itu belum termasuk anggaran bagi TNI dan Badan Kesbangpol.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Buleleng dengan Komisioner KPU Buleleng, Kamis (8/10) di Gedung DPRD Buleleng. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Hj Mulyadi Putra didampingi Sekretaris Komisi Wayan Teren, dan anggotanya. Sementara komisioner KPU dip-

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 4



Sambungan - - -

impin oleh ketuanya Gede Suardana bersama stafnya.

Dalam rapat, KPU menyebut, pelaksanaan Pilkada Buleleng tahun 2017 akan berlangsung pada bulan Pebruari. Namun tahapan Pilkada itu sudah dimulai sejak empat bulan sebelumnya, yakni di tahun 2016. KPU memperkirakan kebutuhan dana pelaksanaan Pilkada itu mencapai sebesar Rp 46, 8 miliar. Dana tersebut untuk biaya honor dan lembur sebesar Rp 22.5 miliar, kemudian pengadaan logistik mencapai Rp 24, 3 miliar.

Akibat tingginya kebutuhan dana Pilkada itu, Wakil Ketua Komisi I, Wayan Teran mengusulkan opsi agar kebutuhan dana itu dirancang dua tahun, yakni di tahun 2016 dan 2017. Alasannya, karena kondisi keuangan pemerintah di tahun 2016 masih sangat terbatas. Apalagi fokus pembangunan fisik tahun 2016 adalah wilayah perkotaan.

"Kalau dianggarkan sekali, ini sangat menyedot APBD. Kawatir nanti program fisik di tahun 2016, tidak bisa jalan," terang politisi Partai Hanura asal Desam Am-

bengan, Kecamatan Sukasada ini.

Sedangkan Sekretaris Komisi I, Hj Mulyadi Putra masih pikirkan untuk dilakukan rasionalisasi terhadap beberapa item yang memungkinkan. Namun, kemungkinan itu sangat kecil karena kebutuhan dana sudah sesuai dengan regulasi yang diamanatkan oleh pusat. "Saya kira dari proposal ini anggarannya memang naik segitifikan dibandingkan kebutuhan anggaran pilkada sebelumnya. Ini karena regulasi baru salah satunya tahapan yang semula 1 bulan ini menjadi dua bulan. Kita akan bahas kembali dan masih ada peluang untuk kita mencermati item mana yang mungkin kita bisa koreksi," katanya.

Sementara, Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengatakan, kebutuhan dana itu bisa diakomodir dalam satu tahun anggaran yakni pada APBD Induk 2016. Karena pihaknya kebutuhan dana itu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2016. "Pertengahan tahun 2016, kami sudah membutuhkan dana, dan diawal tahun 2017 itu kami sudah pengadaan logistik," terangnya. **k19**



Gubernur Jamin Bansos Cair

★ Payung Hukum Gunakan Pergub

DENPASAR, NusaBali
Tarik ulur pencairan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah untuk desa adat dan kelompok masyarakat di Bali, akan segera final. Gubernur Made Mangku Pastika janjikan bansos dan hibah bakal cair dengan payung hukum Peraturan Gubernur (Per-gub). Gubernur Pastika pun mengatakan siap bertanggung jawab demi kepentingan rakyat Bali.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Pastika saat hearing dengan jajaran Panitia Khusus (Pansus) APBD bentukan DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Kamis (8/10) siang.



• NUSABALI/HENDRA

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5 Gubernur Pastika hearing di DPRD Bali, Kamis (8/10).

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 1



Gubernur Jamin Bansos Cair

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Dalam hearing kemarin, Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta, Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pемыayun, Kepala Inspektorat Provinsi Bali Ketut Teneng, dan sejumlah pimpinan SKPD.

Dalam hearing yang dipimpin Ketua Pansus APBD Ketut Kariyasa Adnyana (dari Fraksi PDIP DPRD Bali) dan dihadiri langsung Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama tersebut, Pastika tegaskan pencairan bansos/hibah nantinya akan menggunakan Pergub sebagai payung hukum.

"Pergub-nya sudah ada. Katanya, hari ini (kemarin) akan ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan bisa turun. Saya sudah bicara juga dengan Pak Ketua Dewan (Adi Wiryatama), beliau akan berusaha juga berjuang dengan jalur yang dimiliki supaya Pergub segera turun," ujar Pastika.

Pastika menegaskan, bansos/hibah harus segera dicairkan, karena Pemprov Bali konsisten dengan program-program pro rakyat. "Demi kebaikan rakyat kita, saya pastikan bansos/hibah ini bisa cair tepat waktu. Jadi, jangan khawatir," tegas mantan Kapolda Bali ini.

Di tengah berbicara masalah bansos dan hibah kehadiran anggota Dewan dalam

hearing kemarin, Pastika sempat-sempatnya menyentil anggota DPRD Bali. Menurut Pastika, bansos dan hibah adalah janji-janji dari anggota dewan kepada masyarakat. Bansos dan hibah yang difasilitasi Dewan tersebut dipertanggungjawabkan Gubernur.

"Bapak-bapak anggota Dewan yang memfasilitasi bansos dan hibah. Yang janji kan bapak-bapak, bukan saya. Saya pasti teken. Yang tanggung jawab kan saya. Ya, saya sudah siap bertanggung jawab, mudah-mudahan, tidak ada masalah," ujar penyandang 'Asia Star 2003' ini disambut tepuk tangan anggota Dewan.

Menurut Pastika, dana-dana transfer ke kabupaten/kota saat ini cukup besar. Setidaknya, ada dana Rp 1,3 triliun mengalir ke kabupaten/kota. "Yang kita kasi ke kabupaten/kota itu lumayan banyak. Kalau hibah, saya sudah teken sebenarnya. Kalau ternyata belum bisa direalisasikan menjadi duit, ya sabar dulu. Nanti pasti direalisasikan," ujar Gubernur Bali pertama asal kawasan utara Buleleng ini.

Selain masalah bansos dan hibah, dalam hearing eksekutif-legislatif kemarin juga dibahas sejumlah persoalan program pro rakyat Bali Mandara, serta kasus-

kasus sosial mulai pendidikan, kemiskinan, masalah kesehatan, hingga pungutan liar (pungli). DPRD Bali pun meminta Gubernur Pastika untuk mengevaluasi program Bali Mandara seperti bedah rumah dan Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi).

Anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Bangli, Nyoman Adnyana, mengatakan Simantri yang menggelontorkan sapi kepada kelompok tani, banyak tidak beres. "Saya temukan banyak masalah dan ini harus dievaluasi. Banyak lagi kasus-kasus lain, saya tidak mau borong pertanyaan, karena nanti yang lain nggak keba-

gian," ujar Adnyana.

Atas pertanyaan politisi PDIP asal Bangli ini, Gubernur Pastika mengakui apa yang disampaikannya. "Saya akui memang terjadi hal itu (masalah di Simantri). Ya, itulah namanya manusia. Saya sidak sapinya di desa, lengkap jumlahnya. Rupanya, begitu saya pergi, belum sampai satu kilometer, sapinya sudah nggak ada. Kandungannya bersih banget. Ternyata memang sapinya sudah tidak ada," ujar Pastika.

Sedangkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Gunawan, dalam hearing kemarin menyoroti masalah masih banyaknya pungli terhadap mobil angkutan pariwisata dan para sopir, yang dilakukan oknum aparat. "Di luar negeri *sing ade gumi buke kene* (tidak ada dunia seperti di Bali)," tandas Gunawan.

"Di depan mata wisatawan, ada pungutan Rp 20.000 atau Rp 50.000. Saya minta Pak Gubernur supaya koordinasi dengan kepolisian, tertibkan ini. Jangan biarkan rusak pariwisata kita," lanjut politisi senior asal Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani yang juga Ketua DPD II Golkar Bangli ini.

Menanggapi masukan Gunawan, Gubernur Pastika berjanji pihaknya akan segera menindaklanjuti hal ini dengan Kapolda Bali, terutama masalah pungli terhadap para sopir dan kendaraan angkutan wisata. Pastika juga bertanya balik terhadap Dewan, apa solusinya kalau yang melakukan pungli itu sejatinya bukan oknum aparat saja?

"Saya lihat di Pantai Sanur, kalau kendaraan masuk jalan pantai, dipungutin juga itu. Kalau saya yang buka jendela, tidak dipungutin. Kalau tidak dibuka jendelanya, bayar itu. Yang jaga pakai tato, pakai udeng juga. Bagaimana itu? Uangnya ke mana, saya juga nggak tahu," jelas Pastika. "Oke, saya terima masukan rekan Dewan, nanti saya akan bicara sama Kapolda Bali," imbuhnya. **nat**



Kasus Dugaan Mark Up Lahan BP3TKI Denpasar ✓ Dua Nama Baru Belum Disentuh Polisi

DENPASAR, NusaBali

Setelah nama Wahyu Matondang alias Dodik yang disebut sebagai otak dugaan korupsi mark up lahan BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar, muncul nama baru lagi dalam kasus ini, yaitu Inspektorat Jenderal di BNP2TKI, Mangasi Simanjuntak yang disebut sebagai atasan Dodik. Namun Polda Bali yang menangani kasus ini setelah mendapat limpahan dari Mabes Polri belum menyentuh keduanya.

Dalam sidang yang digelar, Rabu (7/10) lalu Dodik yang sebelumnya disebut sebagai otak korupsi karena mengatur kenaikan harga tanah dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar dan menerima aliran uang hasil korupsi Rp 1,5 miliar langsung membantahnya. Malah Dodik terus menyebut nama Inspektorat Jenderal di BNP2TKI Jakarta, Mangasi sebagai atasan yang mengajaknya dalam pengadaan lahan BP3TKI Denpasar yang berujung mark up Rp 2,2 miliar.

Hakim yang memimpin sidang Tipikor, Edward Harris Sinaga sempat menanyakan status Dodik dan Mangasi dalam kasus korupsi dengan dua terdakwa, yaitu Kepala BP3TKI Denpasar, Wayan Pageh dan Priyo

Adi Santoso. Namun jaksa mengatakan jika keduanya masih berstatus saksi dan penyelidikan dilakukan Mabes Polri. Sementara dalam penyidikan di Polda Bali untuk dua tersangka lainnya, Dodik dan Mangasi juga masih menjadi saksi. "Kalau begitu kami akan panggil penyidikannya," ujar hakim Edward dalam sidang.

Sementara itu, penyidik Dit Reskrim Polda Bali yang menangani kasus mark up lahan BP3TKI Denpasar dengan dua tersangka lainnya, yaitu pemilik tanah, Gede Nyoman Paramartha dan Ketua Panitia Pengadaan Lahan, Trusdi Prio Sambodo malah mengaku tidak tahu dengan peran Dodik dan Mangasi ini. "Kami hanya dapat pelimpahan dari Mabes Polri untuk dua tersangka ini (Paramartha dan Trusdi, red) dan sekarang sedang memprosesnya," jelas penyidik, Kamis (8/10).

Ia mengatakan saat ini masih fokus menyelesaikan berkas untuk kedua tersangka ini. Namun jika nantinya memang mengarah ke Dodik dan Mangasi, tentu akan ditindaklanjuti. "Tapi sampai sekarang hanya dua tersangka ini yang kami proses," pungkas penyidik yang enggan disebutkan namanya ini. **rez**

Edisi : Jum'at, 9 Oktober 2015

Hal : 5



• NUSABALI/SUGIANTO
TERSANGKA | Gusti Made Putra Adiyasa (diborgol).

Kejari Tabanan ✓ Tahan Sarjana Membangun Desa

★ Diduga Gelapkan Dana Kelompok Ternak

TABANAN, NusaBali

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Tabanan menahan I Gusti Made Putra Adiyasa, 37, setelah dilimpahkan Polres Tabanan dalam kasus dugaan menggelapkan dana kelompok ternak di Desa Sunantaya, Kecamatan Penebel, Tabanan. Adiyasa langsung dijebloskan ke Lembaga Perumahan dan Kelurahan

IIB Tabanan di Banjar Gerang, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan untuk 30 hari pertama, Kamis (8/10). Akibat perbuatan Sarjana Membangun Desa ini, negara mengalami kerugian Rp 150 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tabanan, Faturahman saat dikonfirmasi membenarkan menahan Putra Adiyasa, warga Banjar Sunantaya Kelod, Desa Sunantaya, Kecamatan Penebel. "Sekarang kami titip di Lapas Kelas IIB Tabanan," jelas Fatur. Dijelaskan, kasus dugaan korupsi dana bantuan program Sarjana Membangun Desa (SMD) ini terjadi tahun 2012.

Berawal dari tersangka melamar SMD melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menggandeng Kelompok Tani Mekar Sari, Banjar Sunantaya Kelod, Desa Sunantaya, Penebel. Putra Adiyasa akan mengembangkan kelompok ternak ayam. Pemuda asal Desa Sunantaya ini pun dinyatakan lulus seleksi. Setelah dana turun ke rekening kelompok ternak Mekar Sari secara bertahap, diduga dana tersebut seluruhnya dikelola Putra Adiyasa tanpa melibatkan anggota kelompok. Informasinya dana turun secara bertahap, pertama sebesar Rp 60 juta pada tanggal 11 Juli 2012, berikutnya pada tanggal 30 November 2012 cair Rp 45 juta. Terakhir pada 25 April 2015, dana cair Rp 45 juta sehingga total dana turun untuk kelompok ternak mencapai Rp 150 juta.

Dana yang turun diakui dimanfaatkan untuk buat kandang seluas 25 x 10 meter pada tahun 2012. Satu kandang diisi 150 ekor ayam. Lainnya dibelikan pakan ternak hingga vaksin. Atas perbuatannya, Putra Adiyasa dikenakan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "Sekarang kita titip di Lapas Kelas IIB Tabanan," tandas Fatur.

Kalapas Kelas IIB Tabanan, Ida Bagus Ardana saat dikonfirmasi membenarkan menerima titipan tahanan dari Kejari Tabanan. Dikatakan, tahanan titipan itu diterima pada pukul 15.00 Wita dalam keadaan sehat. Selanjutnya, Putra Adiyasa ditempatkan di ruangan mapenaling (masa pengenalan lingkungan). "Dititip untuk 30 hari pertama," tandas Ardana. **k21**

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 5



Pasar Tradisional Banjar Mulai Dibangun, Siap Tampung 200 Pedagang

SINGARAJA, NusaBali

Pembangunan pasar tradisional di Desa/kecamatan Banjar, sudah mulai dikerjakan. Nantinya, pasar tersebut mampu menampung sekitar 200 pedagang. Diperkirakan awal Januari 2016 nanti, pasar tersebut sudah mulai beroperasi.

Pembangunan pasar itu sebagai pengganti dari keberadaan pasar tradisional yang berada di pusat desa. Pasar yang baru itu dibangun di atas lahan seluas 37 are, dengan nilai sebesar Rp 5,9 miliar yang bersumber dari dana tugas pembantuan (TP) dari Pemerintah Pusat. Dalam kontrak kerja, pembangunan pasar itu sudah harus rampung tanggal 14 Desember nanti.

Kadis Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagrin), Buleleng Ni Made Arnika, Kamis (8/10) mengatakan, pembangunan pasar baru tersebut mampu menampung seluruh pedagang yang berada di pasar sebelumnya. Bahkan, dari jumlah los yang dibuat, masih ada sisa untuk memberikan warga lain yang ingin juga berjualan.

"Sudah kami perhitungkan, ketika pedagang direlokasi, semuanya bisa tertampung, karena PD Pasar sudah mendata jumlah pedagang sebelumnya. Karena los yang dibangun mencapai 200 los, sedangkan jumlah



SEJUMLAH pekerja sedang menyambung tiang pancang pembangunan pasar tradisional di Desa Banjar, kemarin.

pedagang dibawah jumlah los yang kami bangun," terangnya.

Arnika juga menyebut, selain membuat 200 los, di pasar yang baru itu juga dibuat kantor pengelola pasar, ruang serba guna, tempat tera dan WC, serta tempat parkir. Sehingga, pasar yang baru itu diyakini lebih representatif dibanding pasar yang ada sebelumnya. "Mudah-mudahan pasar ini memberikan manfaat yang lebih baik bagi pedagang di sini dan warga sekitarnya," ucap Arnika.

Semula, Pemkab Buleleng hanya berniat merenovasi pasar yang ada di pusat desa. Namun, karena ada persoalan lahan, rencana itu pun

dibatalkan. Kabarnya, sebagian dari lahan pasar sekitar kurang lebih 4 are, milik pengempon pura yang ada di wilayah itu, dan sebagian lagi milik Pemkab.

Nah, tidak ingin ada persoalan, para tokoh masyarakat setempat akhirnya mencari jalan tengah. Akhirnya disepakai lahan yang dipakai lokasi pasar adalah lahan pelaba pura yang dimiliki oleh dua desa adat yakni Pakraman Banjar dan Pakraman Banjar Tegeha. Lokasi lahan itu berada hampir kurang lebih 300 meter dari pasar yang ada di pusat desa, tepatnya di sebelah Selatan Polsek Banjar. **k19**

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 4



Polda Panggil 14 Tersangka

SPPD Fiktif

★ Tak Ada Aturan

Pemkab Beri Pembelaan Hukum

Soal penahanan itu, tergantung tindakan Penyidik Kejati Bali.

GIANYAR, NusaBali

14 tersangka kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Dispenda Gianyar memenuhi panggilan Tim Penyidik Polda Bali, Kamis (8/10). Mereka dipanggil untuk menjalani pemeriksaan tambahan, menyusul Senin (12/10), Tim Penyidik Polda Bali akan melimpahkan tahap II kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, lanjut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar.

Informasi di Mapolda Bali, 14 tersangka tersebut datang ke Polda Bali sejak pukul 12.00 Wita. Mereka langsung masuk ruang pemeriksaan penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali. Seki-

tar pukul 13.00 Wita, penyidik selesai melakukan pemeriksaan dan seluruh tersangka diperbolehkan pulang. "Mereka sudah kembali sejak pukul 13.00 Wita siang tadi," ujar salah seorang penyidik.

Pemanggilan 14 tersangka SPPD ini untuk pemeriksaan tambahan sebelum pelimpahan kasusnya tahap II yaitu pelimpahan barang bukti dan tersangka ke Kejati Bali. Pemanggilan ini juga untuk mengecek keberadaannya bahwa para tersangka dalam kondisi sehat dan masih berstatus sebagai pegawai di lingkungan Pemkab Gianyar.

Meski sudah sampai tahap P-21, 14 tersangka ini belum ditahan oleh penyidik Polda Bali. Karena penahanan atau tidak tergantung keputusan pihak Kejati Bali. Namun, lanjut salah seorang penyidik, kecil kemung-

kinan tak ada penahanan, sebagaimana kasus-kasus korupsi lainnya yang sudah tahap P-21. "Soal penahanan itu, tergantung Penyidik Kejati Bali," lanjut penyidik yang enggan disebutkan namanya.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Hery Wiyanto membenarkan pemanggilan 14 tersangka untuk pemeriksaan tambahan tersebut. "Untuk kasus ini, Penyidik Polda akan segera melimpahkan ke Kejati Bali," ujar Kombes Hery.

Salah seorang dari 14 tersangka, Made Ritama membenarkan pemanggilan itu. Mantan Kasi Penagihan di Kantor Dispenda ini mengaku sangat terkejut dengan kelanjutan kasus ini. Karena ia dan 13 teman lainnya telah mengembalikan uang sebagaimana SPPD dimaksud ke kas Negara. Jumlah uang yang dikembalikan itu bervariasi antara Rp 6 juta, Rp 7 juta, Rp 13 juta, dan Rp 14 juta.

Ritama yang kini pegawai di Dinas Pariwisata Gianyar ini mengharapkan agar Pemkab Gianyar dapat memberikan bantuan hukum terkait kasus yang menimpa dirinya dan teman-temannya itu.

Kepala Bagian Hukum Setda Gianyar Ida Ayu Tirta SH mengatakan, selama ini tidak ada satu ketentuan yang mengharus-

kan atau memberikan peluang kepada Pemkab untuk memberikan advokasi atau pendampingan hukum kepada PNS/pegawai yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Pihaknya hanya bisa memberikan sebatas bentuk konsultasi terkait ketidakpahaman ketentuan yang dilanggar.

Sebelumnya, Kejari Gianyar memproses kasus SPPD fiktif yang menyeret 14 tersangka pegawai Dispenda Gianyar. Ka-

sus ini dilidik Polda Bali sejak pertengahan 2013, lanjut dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Kajati Bali meneruskan ke Kejari Gianyar karena wilayah kasus ada di Gianyar. Kajari Gianyar Ketut Sumedana mengatakan, modus kasus ini, pada 2013 sesuai SPPD, 14 pegawai Dispenda itu sedianya melaksanakan program kegiatan untuk peningkatan PAD ke Jakarta. Namun dari 14 orang itu, 10 orang di antaranya berangkat melenceng ke Bogor untuk kepentingan pribadi dan 4 orang lagi ke Thailand, juga untuk kepentingan pribadi. Dalam berkas berbeda, dari 14 orang itu masih ada empat orang lagi berangkatnya ke Malaysia, bukan ke Jakarta, sebagaimana SPPD pada bulan berbeda 2013. "Atas tindakan ini, Negara dirugikan ratusan juta rupiah," jelasnya. **rez, lsa**

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal : 6